

## PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIDESA SIDO MUKTI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

Siti Nurul Fajar<sup>1\*</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293, Indonesia

Mayarni<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293, Indonesia

### **Abstract.**

*The management of community empowerment in Sido Mukti Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency is a village business institution for the community to improve the community's economy and develop community potential so that it can increase the ability to self-actualize or participate through various activities. This study aims to find out how community empowerment is managed in Sido Mukti Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The research method used is descriptive qualitative research. Then data analysis with data collection, data reduction, data presentation and conclusion presentation. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions of the research are as follows: first, in the implementation of community empowerment management, planning has been formed by the manager but it does not work effectively, organizing has appointed managers who are village communities, mobilization does not move the work of members to join and monitoring in order to achieve success in managing community empowerment, and conducting supervision and evaluating every 3 months. Second, there are inhibiting factors, namely human resources and the lack of intensity of socialization of village fund allocations to the community.*

**Keywords:** Management, Community Empowerment

### **Abstrak.**

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga usaha desa untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa sido mukti kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat sudah di bentuk perencanaan oleh pengelola namun tidak berjalan dengan efektif, pengorganisasian telah menunjuk pengelola yang merupakan masyarakat desa, penggerakan tidak mengerakkan kerja anggota untuk ikut

bergabung dan menonitoring agar tercapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan mengadakan dan mengevaluasi tiap 3 bulan sekali. Kedua, adapun faktor-faktor penghambat yaitu sumber daya manusia dan kurangnya intensita sosialisasi alokasi dana desa pada masyarakat.

*Kata Kunci:* Pengelolaan, Pemberdayaan masyarakat

## 1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan yang berada di desa. Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (UU Nomor 72 tahun 2005). Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana desa sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan

dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa yaitu tentang Pelatihan penyuluhan pemberdayaan Perempuan serta penataan atau pengembangan BUMDesa dan sosialisasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Permasalahan yang ada di Desa Sido Mukti ini adalah masih terdapat penduduk miskin di Desa Sido Mukti yang memerlukan perhatian, terdapat kendaraan berat dari berbagai perusahaan yang melintas menyebabkan kerusakan jalan, masih perlunya dukungan sarana dan prasarana olahraga di Desa Sido Mukti terutama dari pemerintah dan masih terjadi kerusakan hutan dan lahan serta ada persoalan menangani status lahan antara masyarakat dan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta harus memiliki komitmen, partisipasi dan bersinegri dalam memberdayakan masyarakat.

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa Sido Mukti dalam pencapaian tujuan yang tak luput dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan guna untuk memastikan pemberdayaan masyarakat dapat dikelola dengan baik, namun pengelolaan dalam pemberdayaan masyarakat disini tidak dapat dikelola dengan baik karena terdapat masyarakat yang kurang antusias dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam mencapai tujuan pengelolaan pada tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana karena pandemic covid-19 yang tidak dapat dijalankan dan dana anggaran di kembalikan kepada Negara menjadi APBDes perubahan, dan untuk di tahun 2019 pengelolaan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan karena pertama kali sedang maraknya covid-19 dimana harus menjalankan penerapan yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah agar untuk tidak menjalankan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa sido mukti termasuk banyak kegiatannya, diantaranya memberikan bantuan modal usaha UMKM (usaha masyarakat kecil menengah), bantuan pupuk untuk petani, bantuan bibit ikan untuk peternak ikan sekolah lapangan untuk para petani sayuran, dan lainnya. Hal itu dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa sido mukti.

Berdasarkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sido Mukti masih terdapat permasalahan, yaitu; secara substansi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat didesa Sido Mukti.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.

Menurut Husaini dan Purnomo (2009:130) pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi.

Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sido Mukti**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa, harus adanya kerjasama BPD dengan masyarakat untuk menyampaikan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa agar masyarakat di Desa Sido Mukti dapat ikut berpartisipasi dalam

peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dalam hal ini untuk mengetahui pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelawawan menggunakan teori ukuran pengelolaan Menurut George R.Terry (2006:342) dengan menggunakan empat ukuran yang perlu dipenuhi dalam hal pengelolaan. Berdasarkan teori George R.Terry ada empat variable yang perlu di penuhi yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sido Mukti telah memiliki perencanaan yang baik dan matang, mempertimbangkan untuk Desa ke depannya, perencanaan yang dibuat belum berjalan denan baik Karena didalam perencanaan tidak dilakukannya sosialisasi kepada msyarakat untuk menyampaikan rencana yang sudah di buat, dnegan tidak adanya sosialisai bersama masyarakat maka masyarakat Desa Sido Mukti kurang minatnya untuk ikut serta dalam kegiatanh tersebut.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa, BPD harus ikut berkerjasama kepada pemerintah desa agar dapat menyampaikan sosialisasi tentang kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah Desa Sido Mukti dengan tujuan agar masyarakat memiliki daya tarik untuk ikut menjalankan kegiatan tersebut.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pembagian kerja dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa dan bendahara, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari tenaga administrasi, karang taruna dan pegawai lapangan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa, didalam organinisasi itu pasti terjadinya penyimpangan. Agar tidak terjadi penyimpangan di sini dilakukannya pengawasan 3 bulan sekali untuk pemeriksaan absen dan apabila tidak terjadi kedisiplinan pegawai tanpa alasan yang jelas maka langsung dibuatnya surat peringatan kepada yang

bersangkutan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, ini merupakan salah satu contoh pengawasan kepada pegawai yang dilakukan oleh pemerintah desa Sido Mukti.

### **3.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sido Mukti**

Pada latar belakang sebagaimana telah dijelaskan untuk menunjukkan tentang bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa Sido Mukti. Adapun hasil dari observasi dan wawancara yang telah disampaikan oleh beberapa informan terkait dalam pembahasan pengelolaan tersebut maka terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sido Mukti adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretis Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa Sido Mukti perlu sumber daya manusia yang baik agar dapat menjalankan sesuai rencana yang telah dibuat.

#### **2. Kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan penulis dapat menyimpulkan bahwa, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti ataupun tidak paham tentang alokasi dana desa (ADD) yang terlihat sosialisasinya sangat minim, sehingga sulit untuk masyarakat memahaminya dan sulit untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam menjalankan pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sido Mukti.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tidak berjalan dengan efektif yang belum mengikuti prosedur dan aturan pemerintah desa dalam menerapkan aspek-aspek

strategi mengelola pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

1. Dalam perencanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah direncanakan berbagai program-program yang ingin dijalankan dikelola serta anggaran-anggaran yang akan digunakan dan dikelola pemberdayaan masyarakat. Aspek Pengorganisasi, pemberdayaan masyarakat menunjuk pengelola yang merupakan unsure masyarakat desa sido mukti dan tidak memiliki tugas di pemerintah desa dan dalam membangun komunikasi kerja yang baik dibutuhkan kerja sama agar tercapai suatu kesatuan usaha dan tujuan organisasi. Aspek Penggerakan, dalam mencapai sasaran yang sesuai perencanaan dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat pengelola tidak menggerakkan kerja anggota untuk ikut bergabung dan memonitoring agar tercapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Aspek Pengawasan, dalam pengawasan hasil kerja pengelola dan masyarakat tetap mengadakan pengawasan dan mengevaluasi setiap 3 bulan sekali agar dapat mencapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Sumber daya manusia dan kurangnya intensitas sosialisasi alokasi dana desa pada masyarakat merupakan faktor penghambat yang sangat memengaruhi keberhasilan dari pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

## **Daftar Pustaka**

Abdur Rozaki, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : Ire Press.

Chandra Kusuma Putra dkk (2016) yang berjudul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

<http://eprints.umm.ac.id/33381/1/jiptummpp-gdl-febryiasr-44941-1-pendahuluan.pdf>

Ezmir, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada

George R. Terry, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas (2015) berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.

<http://ejournal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480>

Hanif (2011:81), *Pemerintahan Desa Pertumbuhan & Penyelenggaraan*.

Moh.Sofiyanto dkk (2017) berjudul *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*.

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/2685>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

<https://www.slideshare.net/zulfikri21/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

Sugiyono (2016:56-57), *Metodologi Penelitian*.

Moh.Sofiyanto dkk (2017) berjudul *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*.

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/2685>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

<https://www.berkasedukasi.com/2018/07/uu-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>



**JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)**

**Vol.1, No.4 Desember 2022**

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 97-105

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

<http://dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/UndangUndang-Republik-Indonesia-Nomor-23-Tahun-2014-Tentang-Pemerintah-Daerah.pdf>

Nurliana.(2013) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.eJournal Administrasi Publik. Volume 1 (Nomor 3, 2013), 1059-1070.*

Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 *tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri.*

---